

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Oleh : Emy Riski Arista

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Latar belakang penulisan skripsi ini dikarenakan adanya aturan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia, wajib bersertifikasi halal, Namun dalam ketentuan lain dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang mengandung bahan tidak halal dapat beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai peran pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal serta Untuk mengetahui dan mengkaji peranan pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan produk makanan halal yang beredar di masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan huku primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu untuk pembahasan mengenai peran pemerintah terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Selanjutnya, akibat hukum bagi pelaku usaha produk pangan yang belum bersertifikat halal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Akibat hukum yang diterima bagi pelaku usaha terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal yaitu pengenaan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan maksimal 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Produk Pangan, Sertifikat Halal.

ABSTRACT

THE GOVERNMENT'S ROLE IN REGARDING HALAL PRODUCT CERTIFICATION BASED ON LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES

By : Emy Riski Arista

Main Advisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Advisory Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

The background for writing this thesis is due to the existence of a rule in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in article 4 which states that every product circulating in Indonesia must be halal certified, but in other provisions in Article 26 paragraph (2) of the Law Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantees that products containing non-halal ingredients can be circulated as long as the product contains non-halal information.

The purpose of writing this thesis is to provide an overview of the government's role in food products that are not halal certified and to find out and study the government's role in implementing guarantees for halal food products circulating in the community.

The research method used in writing this thesis is using a normative juridical research type that uses statutory regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. The research approach used is the statutory approach. The types and sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this thesis research are for a discussion of the government's role in food products that are not halal certified. Furthermore, there are legal consequences for food product businesses that are not yet halal certified.

It can be concluded that the Government's role in organizing Halal Product Assurance (JPH) is by establishing the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH), as well as the legal consequences received for business actors for food products that have not been halal certified, namely the imposition of administrative sanctions in the form of taking products from circulation and also criminal sanctions in the form of a maximum imprisonment of 5 years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (Two Billion Rupiah).

Keywords: Role of Government, Food Products, Halal Certificates.